

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Rizki Sridadi. 2016. *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha dan Serikat Pekerja Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia*. Empat Dua Media, Malang
- Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andewi Keni. 2019. *Pertumbuhan Badan Usaha di Indonesia*. Semarang: ALPRIN.
- Danang Sunyoto. 2013. *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Eko wahyudi, et. Al. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap Muda Arifiddun. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Harahap Yahya. 2007. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Ghalia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005
- Mafaid Ahmad. 2022. *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Purwokerto: CV. Amerta Media
- Nugroho Adi Susanti. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- R. Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Zaeini Asyhadie. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

## B. Publikasi Ilmiah

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *Yustisia*, 4(3), 558-580.  
DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8688>
- Dalimunthe, N., Azhari, A. K., Wahyudi, I. H., Aziz, M. T., Cintana, A. D., Khairunisah, K., ... & Adila, P. (2023). Penerapan perjanjian kerja dalam perusahaan terhadap hak ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 83-106.
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.  
DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & Sitompul, H. (2023). Kontrak kerja dalam hukum bisnis ketenagakerjaan: Analisis perlindungan hukum hak dan kewajiban para tenaga kerja. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 110-132
- Iftitah, A. (2017). Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 3(1), 1-21.  
DOI: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>

- Kahfi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 59-72.  
DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665>
- Khalid, A., & Saputra, D. E. (2019). Tinjauan yuridis tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(1), 103-113.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2022>
- Muhlizi, A. F. (2013). Bantuan hukum melalui mekanisme nonlitigasi sebagai saluran penguatan peradilan informal bagi masyarakat adat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 65-79.  
DOI: <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.82>
- Pedju, R. (2016). Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Et Societatis*, 4(8), 57-67.  
DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v4i8.13002>
- Podungge, I. P. (2020). Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja:(Dalam Penetapan Upah Minimum). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 38-50.
- Rangkuti, B. A. F., Siregar, Z. S., & Ramadhan, M. (2023). Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Asahan. *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 5(2), 195-212.
- Sabrie, H. Y., Amalia, R., Agustin, E., & Tasya, A. A. (2019). Pendampingan Bagi Para Tenaga Kerja Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Di Kediri. *Article history*, 2(3), 301-312.
- Sherly, S. A. P., Karsona, A. M., & Inayatillah, R. (2021). Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 310-327.

- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686-696.
- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh bpjs ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 78-84.
- Utami, T. K. (2013). Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 675-686.  
DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696>
- Yantitama, Y., & Wahyudi, E. (2024). Penyelesaian Sengketa Lingkungan antara Warga dengan Pemilik Usaha Ternak Ayam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara

Republik Indonesia 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6887)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan

Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5943)

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165.

Lembaga Sekretariat Kabinet)

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan

Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara. (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1364)

#### **D. Skripsi**

Gusmidah, Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan

Peraturan Perundangundangan ketenagakerjaan, (Disertasi Untuk

Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Sekolah Pasca

Sarjana USU, Medan: 2007.)

Putri, Ellen, R. A. 2022. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Terhadap

Permasalahan BPJS Kesehatan Pekanbaru Di Bidang Perdata yang

Dilakukan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Riau.  
(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau)

Rahmat, D. N. 2023. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama BPJS Kesehatan. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom)

#### **F. Internet**

Kompasiana. Hak dan Kewajiban Pengusaha  
<https://www.kompasiana.com/nadirahfasyarizkia/61b4a72b06310e2fea05e5e2/kewajiban-pengusaha> Diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 19.00 WIB

Kontrak Hukum. 8 Jenis Badan Usaha Di Indonesia,  
<https://kontrakhukum.com/article/jenis-badan-usaha-di-indonesia/>  
Diakses pada tanggal 4 November 2024 pukul 15.00 WIB

#### **G. Lain-Lain**

Wawancara Ibu Anjas Mega Lestari, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara  
Kejaksaan Negeri Jombang Pada Tanggal 15 Juli 2025

Wawancara Ibu Tania selaku pihak BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Pada  
Tanggal 4 Agustus 2025